

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan Dan Indeks Kemiskinan Terhadap Besaran APBD Di Provinsi Sumatera Selatan

Lamazi¹⁾, Yudi Sudihartono²⁾

¹⁾Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indo Global Mandiri, Palembang

²⁾Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Palembang

Email: lamazilamaz67@gmail.com¹⁾, yudipolhut@yahoo.com²⁾

ABSTRACT

Some regencies/cities that have big Regional Government Budgets (RGB) come from Revenue Sharing Fund of Natural Resource show their economic indicators are lower than other regions. This study does to know and analyse a correlation of RGB to economic growth, poverty level and Human Development Index (HDI) at 17 regencies/cities of South Sumatra Province. The research data are from 2013 to 2017 come from BPKAD and BPS, and using quantitative research method that used descriptive statistical analyses to test each variable and analytic statistical analyses which is used scoring analyses and simple regression analyses. Revenue Sharing Fund is a component of central government transfer as one of RGB components so the bigger Revenue Sharing Fund of a region the bigger RGB of that region. Scoring analyses shows some regions that have big RGB in 2017 do not have better rankings and vice versa, some regions that have small RGB get better rankings. Simple regression analyses, from 2013 to 2017, shows that a RGB does not have a correlation to economic growth, poverty level and Human Development Index at 17 regencies/cities of South Sumatra Province. Hence, the bigger RGB is not significant its correlation to the increasing of economic growth, the decreasing of poverty level and the increasing of Human Development Index.

Keywords: *Economic Growth, Poverty Level, HDI*

ABSTRAK

Beberapa kabupaten/kota yang memiliki APBD besar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam menunjukkan beberapa indikator perekonomiannya yang lebih rendah dibandingkan daerah lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan serta pengaruh APBD realisasi terhadap Laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 17 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan dari tahun 2013 s.d.2017 bersumber dari Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah dan Badan Pusat Statistik, serta menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif yang menguji masing-masing variable dan statistik analitis dengan menggunakan analisis scoring dan analisis regresi sederhana. Dana bagi hasil merupakan bagian dari transfer pemerintah pusat sebagai salah satu komponen APBD maka semakin besar dana bagi hasil yang diterima suatu daerah maka semakin besar APBD daerah tersebut. Dari hasil scoring menunjukkan beberapa daerah yang memiliki APBD realisasi yang besar tahun 2017 tidak menunjukkan peringkat yang lebih baik serta sebaliknya terdapat juga beberapa daerah yang memiliki APBD realisasi yang lebih kecil dapat menempatkan peringkat yang lebih baik. Dari hasil regresi linier sederhana dari tahun 2013 s.d. 2017, besaran APBD realisasi tidak menjelaskan adanya hubungan dan tidak berpengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi, tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian semakin besar APBD tidak signifikan pengaruhnya terhadap peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Kata Kunci : *Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, IPM*

1. Pendahuluan

Menurut (Zaini, 2010) Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang melimpah yang dapat membantu meningkatkan perekonomian bangsa, mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakatnya. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki daerah-daerah di Indonesia seperti CPO, energi panas bumi, emas, batubara dan gas merupakan salah satu yang

terbesar di dunia. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang besar tersebut adalah Sumatera Selatan.

Program-program pembangunan yang bersumber dari APBD bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah yang pada akhirnya akan menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun adanya suatu paradox dimana negara ataupun daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah

ternyata memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah, tingkat kemiskinan yang tinggi dan tingkat kesejahteraan yang rendah, inilah yang dinamakan dengan kutukan sumber daya alam (Sholikin, 2018).

Beberapa daerah yang memiliki APBD lebih besar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam ternyata menghasilkan beberapa indikator perekonomiannya lebih rendah serta tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan (Martawardaya, B., T. Basuki, 2016) dan (Rotinsulu et al., 2016). Kondisi ini diindikasikan juga terjadi di beberapa daerah di Sumatera Selatan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis hubungan serta pengaruh APBD realisasi terhadap Laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia di 17 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.

2. Landasan Teori

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut (Pradana, 2018) (Tulangow & Runtu, 2014) mendefinisikan APBD merupakan rencana kinerja tahunan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dimana Dewan Perwakilan Daerah menyetujuinya. Menurut (Larengkum, 2012) kinerja perekonomian suatu daerah tentunya dipengaruhi oleh dampak realisasi anggaran pembangunan dan belanja daerah.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Rotinsulu et al., 2016) pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan dari suatu perekonomian yang mengalami peningkatan dalam hal memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk menganalisis pembangunan ekonomi suatu wilayah serta dapat menunjukkan sejauh mana pergerakan ekonomi menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada waktu tertentu.

c. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan dimana daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tidak menjamin terbebas dari kemiskinan (Zaini, 2010). Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan dan sangat kompleks. Faktor dominan yang mempengaruhinya adalah pendapatan, keuangan, pendidikan, lokasi, dan keterbatasan akses kesehatan (Nurwati, 2008).

d. Indeks Pembangunan Manusia

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan (Zaini, 2010). Pemerintah pusat maupun daerah perlu memperhitungkan pembangunan manusia dikarenakan ada daerah yang memiliki pertumbuhan dan tinggi pendapatan tinggi tetapi memiliki permasalahan sosial dan kemiskinan. Sebaliknya ada daerah yang mempunyai pendapatan rendah namun pembangunan manusianya mencapai tingkat yang tinggi (Ayu Bhakti et al., 2018).

3. Metodologi

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan statistik analitik. Menurut (Wahidmurni, 2017), penelitian kuantitatif adalah suatu teknik dalam penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang berkaitan dengan data berupa angka dan dengan program statistik. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menguji generalisasi hasil suatu penelitian yang bersumber dari satu sampel, sedangkan statistik analitik dengan menggunakan analisis *scoring* dan analisis regresi sederhana digunakan untuk menjelaskan suatu hubungan atau pengaruh antara satu variable dengan variabel lainnya.

3.1. Data

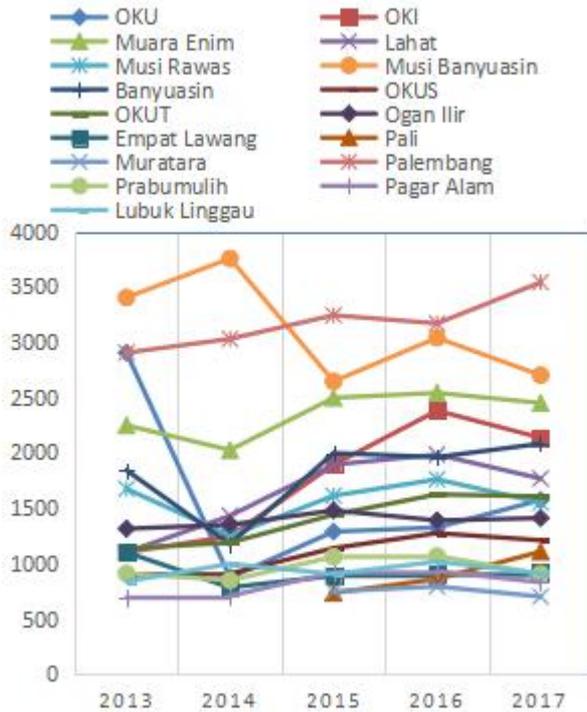
Data pada penelitian ini merupakan data kuantitatif yang perolah dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Data tersebut berupa data pertumbuhan ekonomi, Tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Data Besar APBD seluruh kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2017.

3.2. Metode Analisis

Metode analisis data asosiatif deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan indeks Pembangunan Manusia terhadap besaran APBD di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mengolah data kuantitatif digunakan dengan menggunakan program Excel. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) realisasi yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan serta Laju Pertumbuhan Ekonomi, tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan di 17 kabupaten/kota dari tahun 2013 s.d 2017.

4. Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) kabupaten, yaitu Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Komering Ilir (OKI), Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), Ogan Ilir, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Musi Rawas Utara serta 4 (empat) kota, yaitu Palembang, Prabumulih, Pagar Alam dan Lubuk Linggau. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) realisasi tahun 2013 s.d. 2017. Perkembangan APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

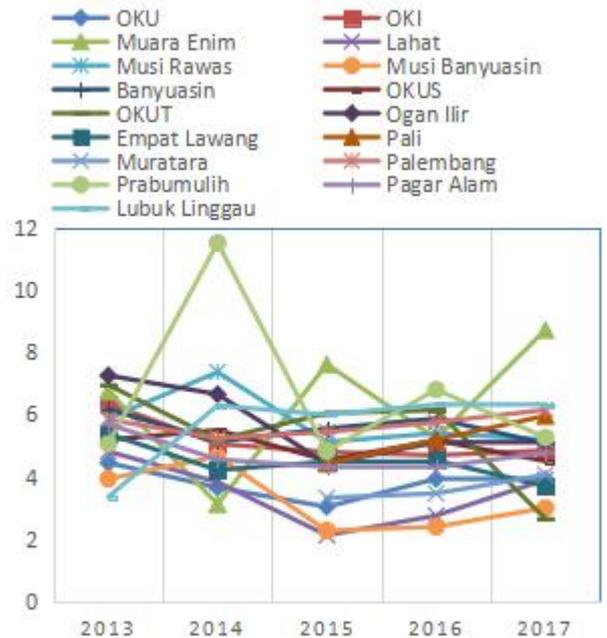


Gambar 1. Grafik perkembangan APBD realisasi di Provinsi Sumatera Selatan

Grafik di atas menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2016 hampir semua kabupaten/kota mengalami peningkatan APBD realisasi kecuali Kota Palembang, namun pada tahun 2017 APBD Kota Palembang kembali mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 6 kabupaten/kota mengalami peningkatan APBD realisasi yaitu Kabupaten OKU, Banyuasin, Ogan Ilir, Pali dan Kota Palembang sedangkan lainnya mengalami penurunan. Dari grafik tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat 6 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten OKU, Muara Enim, Musi Rawas, Banyuasin, Empat Lawang dan Kota Prabumulih yang mengalami penurunan APBD realisasi yang signifikan dari tahun 2013 ke tahun 2014, namun sampai pada tahun 2017 hanya Kabupaten Muara Enim dan Banyuasin yang mengalami peningkatan APBD realisasi lebih besar dibandingkan APBD realisasi tahun 2013. Menurunnya pendapatan APBD di beberapa daerah di tahun 2015 dikarenakan menurunnya transfer Dana Bagi Hasil dari sumber daya alam yang mengalami penurunan diakibatkan oleh menurunnya permintaan dan harga komoditas ekspor di pasaran luar negeri dikarenakan ketidakstabilan perekonomian global (Bank Indonesia, 2015).

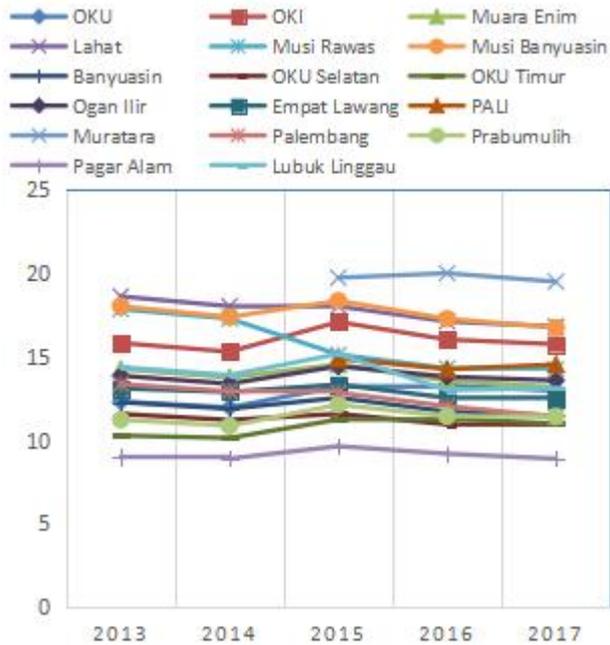
Dalam penelitian ini dilakukan pengujian hubungan antara besaran APBD dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia. Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Variabel laju pertumbuhan ekonomi 17 kabupaten/kota di Sumatera

Selatan dari tahun 2013 s.d. 2017 bervariasi, hal ini dapat dilihat dari data grafik sebagai berikut:



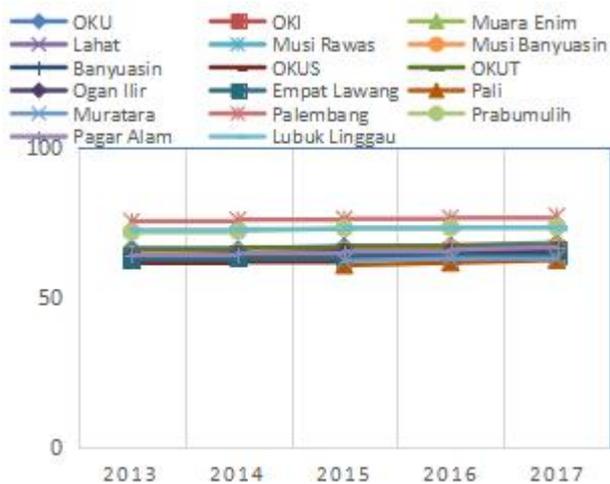
Gambar 2. Grafik perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa sampai pada tahun 2015 hampir semua kabupaten/kota kecuali Kabupaten Muara Enim dan Banyuasin yang mengalami penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi dari tahun-tahun sebelumnya, kemudian mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya. Pada tahun 2017 Kabupaten OKU Timur mengalami penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi yang signifikan dan terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan kabupaten/kota lainnya bervariasi dimana sebagian mengalami peningkatan dan sebagian lainnya mengalami penurunan yang landai. Dari grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih mengalami perubahan variasi Laju Pertumbuhan Ekonomi yang cukup besar dari tahun ke tahun.



Gambar 3. Grafik perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 3 menunjukkan grafik tingkat kemiskinan 15 kabupaten/kota dari tahun 2013 s.d 2017 sedangkan 2 kabupaten lainnya yaitu Musi Rawas Utara dan PALI yang merupakan kabupaten baru dihitung dari tahun 2015 s.d 2017. Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi perkembangan tingkat kemiskinan yang landai, dimana sampai tahun 2017 terdapat 15 kabupaten/kota yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan, sedangkan 2 kabupaten lainnya yaitu OKU Timur dan Prabumulih mengalami peningkatan tingkat kemiskinan yang landai dibandingkan tahun 2013.



Gambar 4. Grafik perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan

Pada Gambar 4 juga menunjukkan grafik perkembangan Indeks Pembangunan Manusia untuk 15 kabupaten/kota dari tahun 2013 s.d 2017 sedangkan 2

kabupaten lainnya yaitu Musi Rawas Utara dan PALI yang merupakan kabupaten baru dihitung dari tahun 2015 s.d 2017. Grafik tersebut menunjukkan bahwa sampai tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusia semua kabupaten/kota stabil mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Hasil Scoring variabel APBD realisasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi, tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2017 di Prov. Sumsel

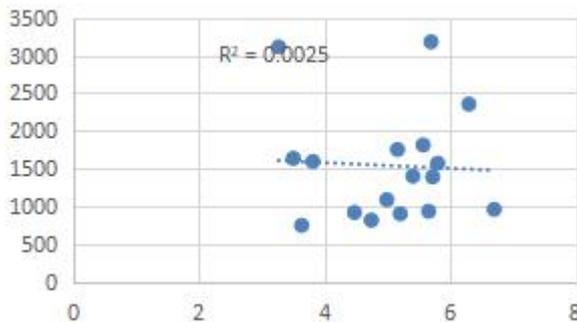
No.	Kabupaten/Kota	Peringkat
1	OKU	7
2	OKI	9
3	Muara Enim	3
4	Lahat	14
5	Musi Rawas	11
6	Musi Banyuasin	11
7	Banyuasin	5
8	OKUS	10
9	OKUT	6
10	Ogan Ilir	11
11	Empat Lawang	16
12	Pali	15
13	Muratara	17
14	Palembang	1
15	Prabumulih	4
16	Pagar Alam	8
17	Lubuk Linggau	2

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim dan Lahat yang mempunyai besaran APBD yang terbesar pertama, ketiga dan kelima tetap memperoleh hasil skor peringkat pertama, ketiga dan kelima. Berbeda dengan Kabupaten Musi Banyuasin, OKI dan Lahat yang memiliki APBD peringkat 2, 4 dan 6, namun dari hasil total skor menunjukkan penurunan peringkat menjadi sebelas, sembilan dan empat belas. Lain halnya dengan dengan Kota Lubuk Linggau, Prabumulih dan Pagar Alam yang memiliki APBD peringkat empat belas, lima belas dan enam belas, setelah dilakukan scoring menghasilkan peningkatan peringkat menjadi dua, empat dan delapan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, dimana dana bagi hasil merupakan bagian dari transfer pemerintah pusat sebagai salah satu komponen APBD sehingga semakin besar dana bagi hasil yang diterima suatu daerah maka semakin besar APBD daerah tersebut. Berdasarkan rincian dana bagi hasil provinsi/kabupaten/kota dalam APBN, Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Lahat dan Musi Rawas merupakan daerah penerima dana bagi hasil sumber daya alam terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan. Tetapi hal tersebut tidak menunjukkan pengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi, tingkat

kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia dibandingkan dengan daerah lain yang menerima dana bagi hasil yang lebih sedikit. Hal ini dapat dilihat dari peringkat hasil dari total skor pada Tabel 1 di atas, dimana Kabupaten Musi Banyuasin, Lahat dan Musi Rawas menempati penurunan peringkat kecuali Kabupaten Muara Enim yang tetap berada pada peringkat ketiga. Tentunya ada perbedaan kondisi antara kabupaten dan kota serta juga dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas wilayah, jangkauan masyarakat terhadap akses pelayanan ataupun juga infrastruktur di daerah masing masing sehingga berpengaruh terhadap peringkat variable-variabel tersebut. Untuk itu perlu adanya penelitian lebih lanjut pada masing-masing daerah untuk mengetahui permasalahan yang ada serta hubungan antara variable tersebut.

Selanjutnya dalam penelitian ini juga dilakukan analisa untuk melihat korelasi antara besaran APBD dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia. Dengan adanya data variable-variabel tersebut dari tahun 2013 s.d. 2017 dapat diketahui korelasi antara APBD dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi, tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia. Dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana, dapat diketahui korelasi antara APBD dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana terlihat pada gambar regresi berikut:

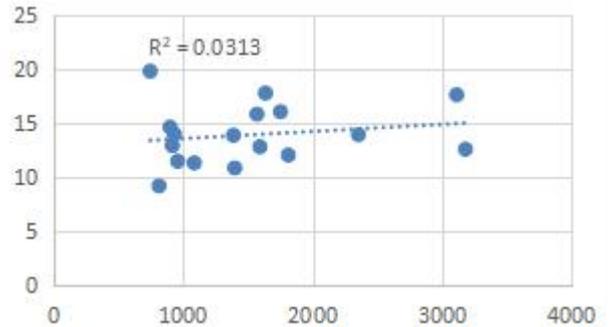


Gambar 5. Grafik regresi hubungan antara APBD dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara besaran APBD dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi, hal ini dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,0025 dan significance F sebesar 0,877429. R^2 sebesar 0,0025 menunjukkan bahwa hanya 0,25 persen dari data menjelaskan adanya hubungan antara APBD dan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan significance F sebesar 0,877429 berarti besaran APBD tidak berpengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi.

APBD tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Ditemukan bahwa terdapat beberapa daerah yang memiliki APBD besar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi yang

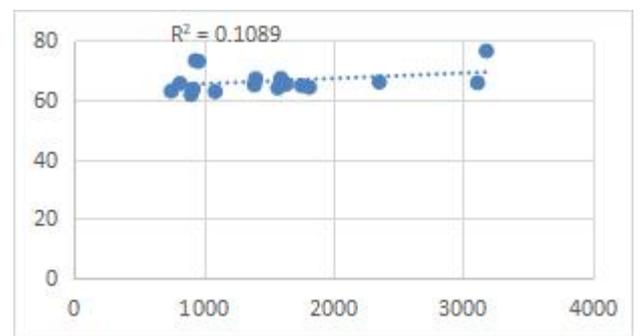
lebih rendah (Martawardaya *et al.*, 2016, dan Rotinsulu *et al.*, 2016). Berdasarkan penelitian dari Susila *et al.* (2014) menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Barat belanja rutin tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.



Gambar 6. Grafik regresi hubungan antara APBD dengan tingkat kemiskinan di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Grafik pada Gambar 6 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara besaran APBD dengan tingkat kemiskinan, hal ini dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,0313 dan significance F sebesar 0,496662. R^2 sebesar 0,0313 menunjukkan bahwa 3,13 persen dari data menjelaskan adanya hubungan antara APBD dan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan significance F sebesar 0,496662 berarti besaran APBD tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Semakin besar APBD tidak signifikan menunjukkan semakin menurunnya tingkat kemiskinan. Beberapa daerah yang memiliki APBD besar menunjukkan tingkat kemiskinannya lebih tinggi dibandingkan daerah yang relatif APBDnya lebih kecil. Hasil ini mengindikasikan bahwa adanya permasalahan kebijakan dalam pengelolaan dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan (Martawardaya, B., T. Basuki, 2016), (Rotinsulu *et al.*, 2016), dan (Zaini, 2010).



Gambar 7. Grafik regresi hubungan antara APBD dengan Indeks Pembangunan Manusia di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Demikian juga dari grafik pada Gambar 5 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara besaran APBD dengan Indeks Pembangunan Manusia, hal ini dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,1089 dan significance F sebesar 0,195907. R^2 sebesar 0,1089 menunjukkan bahwa 10,89 persen dari data, berarti sangat kecil menjelaskan adanya hubungan antara APBD dan Indeks Pembangunan Manusia dan significance F sebesar 0,195907 berarti besaran APBD tidak berpengaruh juga terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa APBD sangat kecil pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang kaya memiliki kecenderungan fokus kepada kebijakan belanja seperti belanja infrastruktur dibandingkan kepada belanja pendidikan dan kesehatan (Martawardaya, B., T. Basuki, 2016). Selanjutnya (Ayu Bhakti *et al.*, 2018) menunjukkan bahwa APBD tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di pendidikan tetapi berpengaruh positif di kesehatan, karena disebabkan tidak meratanya alokasi dana APBD untuk pendidikan antar daerah serta kurangnya keterjangkauan masyarakat dalam menikmati pendidikan.

Belanja modal di sektor pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Pradana, 2018). Sedangkan menurut (Widiastuti, Firly Dwitya Kamilia, 2016), belanja modal pendidikan di Papua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia tetapi belanja kesehatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dikarenakan alokasi dana di sektor kesehatan yang lebih kecil.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil *scoring* menunjukkan beberapa daerah yang memiliki APBD realisasi yang besar tahun 2017 tidak menunjukkan peringkat yang lebih baik serta sebaliknya terdapat juga beberapa daerah yang memiliki APBD realisasi yang lebih kecil dapat menempatkan peringkat yang lebih baik.
2. Berdasarkan hasil regresi linier sederhana dari tahun 2013 s.d. 2017, besaran APBD realisasi tidak menjelaskan adanya hubungan dan tidak berpengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi, tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian semakin besar APBD tidak signifikan pengaruhnya terhadap peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

6. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah mendorong pemerintah daerah untuk tidak tergantung dari Dana Bagi Hasil SDA dengan melakukan diversifikasi

pendapatan dari sektor lain seperti industri manufaktur, jasa dan pariwisata serta mengambil kebijakan pengalokasiandana yang lebih besar dan berimbang terutama di bidang kesehatan dan pendidikan sehingga masyarakat mendapatkan akses, mutu dan pelayanan yang lebih baik. Upaya kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah juga perlu dikedepankan dalam melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang sejahtera.

Daftar Pustaka

- Ayu Bhakti, N. A., Istiqomah, I., & Suprpto, S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 2008-2012. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 18(4), 542-469. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i4.7>
- Larengkum, D. (2012). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Efisiensi*, 62-72.
- Martawardaya, B., T. Basuki, dan M. F. H. (2016). Kutukan sumber daya alam di Indonesia; The curse of natural resources in Indonesia. *Article 33 Indonesia, Newsletter edition 1, September*, 1-4.
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan : Model Pengukuran , Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1-11.
- Pradana, M. (2018). Alokasi Belanja Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Develop*, 2(1). <https://doi.org/10.25139/dev.v2i1.960>
- Rotinsulu, D. C., Tenda, A. R., & Leonufina, L. M. (2016). *Belanja Derah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi* .,
- Sholikin, A. (2018). *Kutukan Sumber Daya Alam (Resource curse)*. *Auty*. <https://osf.io/preprints/inarxiv/d4shn/>
- Tulangow, A. P., & Runtu, T. (2014). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 564-571.
- Wahidmurni. (2017). *Pemaparan metode penelitian kuantitatif*. 1-14.
- Widiastuti, Firly Dwitya Kamilia, T. (2016). *Pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua 2011 hingga 2013 dalam perspektif ekonomi islam*. 4(1), 64-75.
- Zaini, A. (2010). Kemiskinan di daerah kaya sumber daya alam sebuah paradoks pembangunan. *Pkp2a*, 1-19.